



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. FARCHAN**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **69379**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.700.000.000

1. Tanah Seluas 337 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/50 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 738 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
5. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 1.005 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 130.500.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000
2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.105.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.545.175
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.852.150.175
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.702.150.175

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I PUTU PANCA YASA
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 262588

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/100 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/12 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/75 m2 di KOTA DENPASAR ,
WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.500.000

1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA STATION Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 78.200.000



Sub Total	Rp.	2.620.700.000
III. HUTANG	Rp.	4.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.616.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : NI LUH ANGGRA LASMIKA
- Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- NHK : 772095

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	850.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 394 m2/70 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 550.000.000		
2. Tanah Seluas 251 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	49.541.626
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	906.041.626

III. HUTANG **Rp.** **198.738.796**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **707.302.830**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIAN K. ARDIANSYAH
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 133495

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/88 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 47.200.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
37.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.837.570

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 680.037.570

III. HUTANG Rp. 351.981.664

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 328.055.906

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITTA ADLINASARI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 835748

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 520.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/1 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.192.693

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 532.192.693

III. HUTANG Rp. 204.838.401

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 327.354.292

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GANTI CAHYANI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 64147

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	155.000.000
1. Tanah Seluas 85 m2 di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	185.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	700.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	64.649.099
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	405.349.099
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	405.349.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.